

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen

<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>

Vol 3, Tahun 2019 | Halaman 9 - 16

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Dana Bos Di Sekolah Menengah Pertama

Arlin Sarlince Natara^{1*}, Iskandar Ladamay²

Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia

arlinnatara33@gmail.com*

Informasi artikel

Kata kunci:
Implementasi
kebijakan, dana
bos.

ABSTRAK

Tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku yang lazimnya di rumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, ketrampilan yang di harapkan untuk memiliki, oleh itu sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan.. kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara memberikan *rewards* dan *sanctions*. Karena pendidikan pada jaman era moderen sekarang ini sudah merupakan bagian dari kebutuhan yang tidak dapat di pisahkan. Karena dari segi sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengebangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit. Berdasarkan temuan dari penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan mengenai dana bos ini merupakan dana yang di keluarkan oleh pemerintah untuk membantu siswa yang tidak mampu dalam biaya pendidikan. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang dana bos dan untuk mengetahui dampak kegunaan dana bos bagi sekolah di SMPK. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang di temukan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang dana bos di SMPK sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya bantuan atau dana yang di keluarkan oleh pemerintah sangat membantu bagi siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu dalam biaya pendidikan.

Copyright © 2019 Arlin Sarlince Natara^{1*}, Iskandar Ladamay². All Right Reserved

Pendahuluan

Pendidikan sebagai kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan yang berlangsung seumur hidup untuk mempersiapkan peserta didik memainkan peranannya yang tepat dan konduktif dalam berbagai lingkungan hidupnya di masa yang akan datang (Citra, 2012). Tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku yang lazimnya di rumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, ketrampilan yang di harapkan untuk memiliki oleh sasaran pendidikan setelah menyelesaikan program pendidikan (Oviyanti, 2016) . Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu negara (Suryani, 2018) . Permasalahan pendidikan di indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin (Akbar, 2016). Dan masih banyak anak-anak yang masih berusia sekolah tidak mendapatkan pendidikan di sebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi (Karding, 2008). pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia upaya pengajaran dan pelatihan, yang di turunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Yuliana, Widayati, & Taufiq, 2015) .

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Wahyu Nurharjadmo, 2008). oleh karena itu mulai tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan Bantuan Operasional Sekolah sebagai jawaban untuk memenuhi tanggung jawab pemenuhan pendidikan (Kharisma, 2005). Kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah (Regina, Soeaidy, & Ribawanto, 2008).

kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara memberikan *rewards* dan *sanctions* (hamidi, 2011.). Karena pendidikan pada jaman era moderen sekarang ini sudah merupakan bagian dari kebutuhan yang tidak dapat di pisahkan (Akbar, 2016). Karena dari segi sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung juga kurang memadai sehingga untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia sangatlah sulit (Ruswati & Munadi, 2013). Bahkan bangunan yang ada di daerah pedalaman pun bisa di bilang seadanya saja, tenaga pendidiknya pun masih ada yang sukarela dan belum profesional (Ruswati & Munadi, 2013). Apalagi fasilitas yang tidak mendukung, pendidikan masih kurang dari apa yang di harapkan bagaimana sekolah yang di bagian pelosok mau maju kalau sarana dan prasarana masih seadanya seperti itu (Rahayu, 2005).

(Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945) “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” (undang-undang No 20/2003.) yang antara lain mengatakan pasal 5 (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan biaya non pendidikan adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, biaya tak berlansung berupa sumber daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur biaya telekomunikasi (Tedjawati, 2013). Pajak dan yang lain-lain. Banyak faktor-faktor kualitas pendidikan di indonesia rendah, salah satunya faktor teknis seperti rendahnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan kurangnya pemerataan pendidikan (Aloud & Recount, 2017).

Di Sekolah menengah pertama ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan bantuan dana bos yakni untuk membantu dan meringankan biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Dengan adanya dana bos ini bisa membantu sarana dan prasana di SMP dan sudah terwujud. Dana bos ini di keluarkan oleh pemerintah untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi orang tua siswa yang kurang mampu untuk membayarkan biaya personal sekolah. Dana BOS yang di keluarkan oleh pemerintah yang di terapkan di SMP sudah berjalan dengan baik.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan Deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif. kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang utama dan terutama, adapun peneliti mengambil lokasi di SMP. Yang sebagai instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, dimana yang menjadi sumber data dalam penelitian ini data primer adalah kepala sekolah, komite sekolah, guru/bendahara, orang tua siswa sedangkan sumber data sekunder adalah data dokumentasi. Prosedur atau teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk menganalisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan, sedangkan untuk mengesahkan data dari hasil penelitian peneliti menggunakan triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam perilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur ” apa yang boleh dan apa yang tidak boleh” kebijakan juga dapat di harapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberikan peluang di interpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menerut peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 69 tahun 2009 nonpersonalia adalah standar biaya yang di perlukan untuk membiayai kegiatan operasi personalia selama (1) satu tahun sebagai pembagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar Nasional Pendidikan. Bos adalah program pemerintah yang pada dasarnya

adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar bagi pelaksanaan program wajib belajar. Namun demikian ada beberapa jenis investasi dan personalia yang di perbolehkan di biaya dengan dana bos. Sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Widodo (2007) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan alokasi Analisis Proses Kebijakan Publik, bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasioanal yang di lakukan oleh pemerinah dan swasta, individu atau kelompok. Proses tersebut di lakukan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Kebijakan (*policy*) secara etimologi di turun dari kata bahasa Yunani, yaitu "*polis*" yang artinya kota (*city*) dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi yang formal dari perintah dan lembaga untuk mencapai tujuan. Abidin (2006) kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Karena kebijakan merupakan suatu keputusan pemerintah yang berlaku untuk kepentingan masyarakat. Sehingga merupakan suatu proses berpikir dalam sejarah hidup manusia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, (1) tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, untuk mencari pemecahan masalah sehingga pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai kebijakan yang ada. (2) tahap adopsi kebijakandari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebiajakan, diambil salah satu dari alternatif kebijakan tersebut yang dukungan oleh mayoritas perumus kebijakan dan lembaga keputusan peradilan. (3) tahap implementasi kebijakan Dalam suatu program kebijakan akan menjadi sebuah catatan jika program tersebut di implementasikan. Oleh karen itu, sebuah keputusan program kebijakan merupakan alternatif pemecahan suatu masalah harus di implementasikan dan dilaksanakan oleh badan administrasi pemrintah di tingkat bawah. kebiajakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi pemerintah untuk mobilitasi sumber daya finansial dan manusia. (4) evaluasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan di nilai atau di evalusi untuk melihat proses pemecahan masalah dalam menjalankan kebijakan. Karena kebijaka publik di buat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Oleh karena itu, ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang diambil sebagai dasar untuk menilai kebijakan publik yang telah mearaih dampak yang diinginkan (winaryo.2005).

Arif Roman (2009) implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum maupun administratif dalam rangka mencapi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Tujuan utama dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa yang di sebut dana bos merupakan kebijakan yang di keluarkan untuk meringankan beban orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Namun secara umum dana bos di gunakan untuk membantu rakyat miskin agar bisa melanjutkan sekolah menengah pertama. Bantuan operasional sekolah di rintis sejak tahun 2005 merupakan wujud pemerintah dalam melaksanakan atau memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang mengamnatatkan bahwa pemrintah menjamin pelaksanaan pendidikan tanpa pemungut biaya.

Berdasarkan menurut parah ahli di atas saya menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tetang dana bos ini dapat membantu bagi anak-anak yang kurang mampu dalam membnyar biaya pendidikan. Dana bos merupakan bantuan yang di keluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin. Sesuai dengan kebijakan-kebijakan adanya implementasi pemerintah tentang dana bos sanagat membantu sarana dan prasarana di sekolah. Dan juga membantu bagi siswa/siswi yang kurang mampu dalam biaya pendidikan di sekolah. Adanya kerja sama antara komite sekolah, kepala sekolah, bendahara/guru, orang tua siswa sehingga bisa mengetahui bersama kalau di SMP mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sekolah penerima dana bos setiap tahunnya pertiga bulan selama satu setahun. Sasaran utamanya adalah untuk meringankan beban orang tua siswa dalam hal pembiayaan pendidikan yang semakin mahal dan penengkatan mutu penedidikan. Di SMP sendiri mayoritas oarang tua siswa bekerja sebagai petani dan buruh.sehingga akan kesulitan untuk mereka yang akan membiaya anaknya untuk sekolah. Pendapatan orang tua juga tidak tetap menjadikan alasan kenapa, tidak dapat memberikan faisilitas pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan tujuan dana bos yang bisa meringankan beban orang tua siswa untuk biaya pendidikan.

Dampak positif dana BOS ini di antaranya dapat membantu anak putus sekolah, terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah, meringankan biaya pendidikan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru penambah program pendidikan dan peningkatan kualitas belajar siswa. Selain itu dengan adanya dana BOS siswa semakin aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatifnya adalah kesalahpahaman masyarakat bahwa dana tersebut seluruhnya di khususkan kepada siswa sekolah dan tidak memotong sepeser pun. Dana BOS merupakan dana yang di salurkan oleh pemerintah bagi orang tua yang betul-betul berasal dari keluarga miskin.

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertidak baik yang berupa sederhana maupun kompleks, terperinci maupun longgar yang di rumuskan melalui proses politik untuk suatu arahan tindakan program serta rencana tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan. Bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Good (1977) kebijakan adalah sebuah pertimbangan yang di dasarkan atas suatu nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional untuk mengoperasikan perencanaan yang bersifat umum untuk memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan demi pencapaian tujuan. Dari menurut pendapat para ahli di atas saya simpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu dasar yang memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kali didengar dan dilakukan tetapi sering kali tidak dipahami dan didengar. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan yang mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan pengaturan kehidupan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Kebijakan pendidikan di lahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktis pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan meliputi (1) analisis kebijakan (2) perumusan kebijakan (3) pelaksanaan dan evaluasi (Tilaar dan Nugroho, 2009). Pemahaman kebijakan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri-ciri kebijakan publik yaitu: (1) Kebijakan tersebut dibuat oleh negara atau lembaga yang berkaitan dengan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. (2) Kegiatan ditujukan untuk mengatur kebijakan bersama (kebijakan publik). (3) Mengatur masalah bersama. (4) Memberikan manfaat bagi masyarakat, untuk kepentingan bersama.

Konteks dari kebijakan secara umum yaitu, kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan sebagai salah satu tujuan pembangunan bangsa dan negara (Nugroho, 2013). Dalam kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi misi pendidikan yang di rumuskan dari pertimbangan pakar dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam komponen kebijakan mengandung tujuan (*goal*), rencana (*plans*), program (*programme*), keputusan (*decision*), serta dampak (*effects*) suatu kebijakan (Rohman, 2009).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Slamet P.H (Rohman dan Winiyo, 2010) kebijakan pendidikan adalah apa yang di Katakan dan di putuskan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan meliputi lima tipe yaitu (1) kebijakan regulatori (2) kebijakan distributif (3) kebijakan redistributif (4) kebijakan kapitalisasi (5) dan kebijakan etik. Beberapa uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan dan keputusannya berasal dari perumusan atau langkah-langkah dan strategi guna mengatasi masalah di bidang pendidikan.

Rohman (2009) proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif organisasi dalam rangka pencapaian suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa suatu implementasi kebijakan tidaklah mudah untuk menjalankan suatu masalah maka dalam kebijakan tersebut harus melibatkan perangkat politik, sosial, hukum dan administrasi. Jones 1996 menganalisis masalah implementasi kebijakan berdasarkan diri pada konsepsi aktifitas-aktifitas fungsional. Dari pendapat di atas mengatakan bahwa ada tiga pilar aktifitas untuk mengoperasikan sebuah program tersebut adalah: (1) pengorganisasian, pembentukan atau penerataan kembali sumber daya atau unit-unit serta untuk menjalankan program agar bisa di jalankan. (2) interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat

diterima serta dilaksanakan. (3) aplikasi, berhubungan dengan aplikasi rutin bagi pembayaran, pembayaran atau lainnya disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Beberapa pernyataan di atas saya mengambil sebuah kesimpulan, karena dalam mengimplementasikan sesuatu kebijakan harus berdasarkan pada konsep atau aktifitas-aktifitas yang ada yaitu perorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Syafuruddin (2008) implementasi kebijakan bermakna untuk pengembangan kriteria khusus dalam praktik bagi pembuat keputusan yang mencapai kebijakan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan harus diperhatikan bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan yaitu: ada beberapa bagian 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi atau sikap, 4. Dan struktur birokrasi. (1) Komunikasi merupakan salah satu variabel yang penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik (Agustino, 2006). Dalam sebuah mengimplementasi, yang efektif dan terlaksana bisa di ketahui para pengambil keputusan dan hanya bisa melalui dengan komunikasi yang baik sehingga bisa terlaksana untuk pencapaian tujuan. (2) Sumber daya di posisikan sebagai input dalam organisasi sebagai salah satu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. (3) Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah karena, dalam hal ini terjadi kebijakan yang di laksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Oleh karena itu kebijakan pemerintah biasanya bersifat *Top down* dan yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan menyentuh kebutuhan, kebutuhan keinginan atau permasalahan yang ada harus di selesaikan. (4) Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi swasta institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan struktur organisasi adalah: suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi.

Pengertian bantuan operasional sekolah atau dana bos merupakan bantuan yang di keluarkan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan untuk membantu kelancaran atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang di susun dalam rencana kerja serta aturan pelaksanaannya. Permendikbud RI (2004) Mengatakan bahwa bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah yang di keluarkan untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasional personalia bagi satuan pendidikan dan pelaksana program wajib belajar.

Arif Roman (2009) implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum maupun administratif dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Tujuan utama dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa yang di sebut dana bos merupakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk meringankan beban orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Namun secara umum dana bos di gunakan untuk membantu rakyat miskin agar bisa melanjutkan sekolah menengah pertama. Bantuan operasional sekolah di rintis sejak tahun 2005 merupakan wujud pemerintah dalam melaksanakan atau memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang mengamatkan bahwa pemerintah menjamin pelaksanaan pendidikan tanpa pemungut biaya.

Berdasarkan menurut para ahli di atas saya menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang dana bos ini dapat membantu bagi anak-anak yang kurang mampu dalam membayarkan biaya pendidikan. Dana bos merupakan bantuan yang di keluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin. Sekolah penerima dana bos setiap tahunnya dalam tiga bulan selama setahun. Sasaran utamanya adalah untuk meringankan beban orang tua siswa dalam hal pembiayaan pendidikan yang semakin mahal dan peningkatan mutu pendidikan. Di SMP sendiri mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai petani dan buruh. sehingga akan kesulitan untuk mereka yang akan membiayai anaknya untuk sekolah. Pendapatan orang tua juga tidak tetap menjadikan alasan kenapa tidak dapat memberikan fasilitas pendidikan yang layak. Hal ini sesuai dengan tujuan dana bos yang bisa meringankan beban orang tua siswa serta dapat melanjutkan sekolah.

Dampak positif dana bos ini di antaranya bisa membantu anak putus sekolah, terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah, alat-alat pembayaran, biaya sekolah peningkatan kesejahteraan guru penambahan program pendidikan peningkatan kualitas guru. Selain itu dengan adanya dana bos siswa semakin aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatifnya adalah kesalah pahaman masyarakat bahwa dana

tersebut seluruhnya di khususkan kepada siswa sekolah dan tidak memotong seprsenpun. Dana bos merupakan dana yang di salurkan oleh pemerintah bagi orang tua yang betul-betul berasal dari keluarga miskin.

Berkaitan kebijakan pemerintah dengan adanya dana BOS di SMP yaitu melaksanakan atau mengimplementasikan dana BOS itu sesuai dengan aturan yang di keluarkan dari pemerintah. Sejauh ini untuk implementasi dana bos di SMPK sudah berjalan dengan baik bahkan dari sekolah lain datang belajar di sini bagaimana cara mengelola dana BOS itu sendiri. Dengan cara mengelola dana bos selama ini uang yang dari pemerintah itu di gunakan untuk pembelajaran misal nya, untuk pengadaan buku cetak, Lembaran Kerja Siswa itu semuanya untuk siswa dan juga pelejaraan tambahan, pengayaan untuk anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih itu di berikan pelajaran tambahan, dan dana itu juga di ambil dari Dana Bos.

Untuk penggunaan Dana Bos sudah berjalan dengan baik dan laporannya juga di laporan secara berkalah karena turunannya tiap-tiap tiga bulan, penggunaan juga sudah dan laporannya juga sudah laporkan. Dengan adanya dana bos dapat meningkat kan prestasi belajar siswa. Adanya buku-buku penunjang anak-anak bisa belajar lebih mudah dan tidak mudah mengeluarkan uang untuk membelih buku karena buku semua sudah di sediakan oleh sekolah dengan bantuan dana BOS.

Dalam pelaksanaan dana bos itu sesuai dengan arahnya yang dari pusat dan kerberuntungannya juga sesuai kemudian, semuanya di alokasikan untuk kegiatan pembelajaran. Dengan adanya dana bos dapat meningkat sarana dan prasarana sekolah sesuai kebutuhan siswa. Misalnya dulunya yang tidak ada Liquid Crystal Display (LCD) sekarang semua kelas ada Liquid Cryztal Display kemudian komputer yang dulunya lefelnya masih bawah sekarang sudah meninggkat kembali karena di pake untuk ujian Nasional. Dana BOS ini sangat membantu sekali bagi sarana dan prasarana sekolah.

Kami sebagai orang tua mengetahui kalau di SMP ada dana bos. Karena sebelum itu kami di kumpulkan dari pihak sekolah untuk memberitaukan kalau di SMP mendapatkan dan bos dari pemerintah. Misalkan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) nya di bantu lansung di berikan di bendahara sekolah. Kemudian lanjut dengan dana BOS laporan per triwulan itu di tempel selain guru tau, kepala sekolah tau, komitenya tau, orang tua tau laporannya di tempel sehingga anak-anak juga tau penggunaannya apa-apa saja itu ada dan nama-nama siswa yang di bantu pun ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti guna untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah tentang dana BOS di SMP yaitu kebijakan pemerintah tentang dana BOS ini sangat bermanfaat bagi sekolah. Hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti program yang di adakan sangat bermanfaat bagi sekolah, orang tua, dan pihak lainnya karena dana BOS yang berikan oleh pemerintah sangat membantu bagi orang tua siswa yang kurang mampu dalam membiayai anaknya dalam dunia pendidikan di sekolah. Dokumentasi yang di peroleh peneliti dalam penelitian ini adalah foto hasil obsevasi dengan pihak sekolah tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang dana BOS di SMP.

Dengan adanya dana BOS sangat membantu sekali baik untuk murid maupun sekolah dan meringankan beban orang tua. Manfaat dana BOS juga meningkatkan motifasi belajar dari peserta didik itu sendiri. Dana yang dari pemerintah itu di gunakan untuk pembelajaran misalkan, pengadaan buku cetak, LKS dan juga pelajaran tambahan, pengayaan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dana itu juga yang di ambil dari dana BOS dan untuk meningkatkan mutu sekolah terutama dari aspek pengetahuan. Dengan bantuan BOS sangat membantu bagi sekolah khususnya untuk operasional sekolah untuk tahun lalu sebelum adanya dana bos kami terkendala kalau mau ada kegiatan terkendala di dana. Sekarang dengan adanya dana bos itu program-program sekolah bisa berjalan. Dengan adanya buku-buku penunjang sekarang anak-anak belajarnya lebih mudah dan tidak mengeluarkan uang untuk membelih buku karena buku semuanya dari Dana BOS. Dari buku-buku baik buku siswa baik buku penunjang sekarang prestasi anak meningkat dengan adanya buku dan selain itu juga dengan adanya buku baru siswa rajin belajar keperpustakaan.

Adanya Dana BOS itu kita bisa lancar untuk kegiatan misalnya, untuk pratikum kita butuh dana ada nantinya dana alokosi Dana BOS nya untuk pratikum. Kemudian untuk olaraga bisa untuk di pake sarana dan prasarana berguna sekali dan menunjang. Kami sebagai orang tua dengan adanya Dana BOS yang di

keluarkan oleh pemerintah sangat membantu sekali dalam pembayaran SPP. Dengan adanya Dana BOS itu bisa mengurangi bianya pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan bahwa dengan adanya dana bos di sekolah dapat meringan bianya pendidikan siswa yang di mampu dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Dari hasil observasi dapat di simpulkan bahwa implementasikebijakan pemerintan tentang dana bos di SMP dapat meringankan bianya pendidikan. Dokumentasi yang di peroleh penelitian dalam penelitian ini adalah foto hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru di SMP.

Simpulan

Implementasi kebijakan pemerintah tentang dana bos di SMP. Implementasi kebijakan mengenai dana bos yang di dikeluarkan oleh pemerintah sangat membantu sekali dalam proses pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu dalam membayar uang sekolah atau SPP. Dana BOS di SMP sudah berjalan dengan baik karena dengan adanya dana bos siswa juga meningkat dalam proses pembelajaran.

Dampak Dana BOS bagi sekolah di SMP yang dulunya tidak mempunyai leb komputer, laboratorium, LCD sekarang bisa terpenuhi dengan adanya bantuan atau Dana BOS yang di dikeluarkan oleh pemerintah dan sangat membantu bagi siswa dalam proses pembelajaran. Dampak dana bos ini dapat membantu anak-anak yang kurang mampu dalam membanyar biaya pendidikan. Dana BOS merupakan bantuan yang di dikeluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin. Dengan adanya Dana BOS program-program sekolah bisa berjalan baik dan buku-buku penunjang anak-anak bisa belajarnya lebih mudah, dan tidak mengeluarkan uang untuk membeli buku atau Lembaran Kerja Siswa (LKS). Dengan adanya buku buku penunjang, sekarang prestasi belajar siswa meningkat.

Di SMP dulunya fasilitas sekolah yang kurang memadai misalnya lep computer, laboratorium, gedung sekolah yang terbatas sekarang dengan adanya dana bos yang di dikeluarkan oleh pemerintah sudah bisa terpenuhi. Karena dana bos yang di dikeluarkan oleh pemerintah sangat membantu untuk sarana sekolah, yang dulunya semua fasilitas terbatas sekarang bisa membantu mulai dari fasilitas sekolah, biaya pendidikan bagi orang tuanya yang kurang mampu untuk membayar Surat Persetujuan Pembayaran (SSP) dan siswa/siswa tidak lagi di pungut biaya untuk membayar LKS. Dengan adanya dana bos kualitas belajar siswa sangat memadai.

Daftar Rujukan

- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan operasional sekolah. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2, 47–64.
- Aloud, R., & Recount, T. (2017). Journal of Educational Research and Evaluation. *Jurnal of Educational and Evaluation*, 6(1), 10–18.
- Citra, Y. (2012). Pelaksanaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 237–249. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu>
- hamidi. (n.d.). Software Dan Hardware , 2, 1–14.
- Indonesia, U. D. N., Indonesia, R., & Esa, Y. M. (1945). Uu Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.
- Karding, abdul kadir. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Pasca Sarjana UnDip*, 1–151.
- Kharisma, B. (2005). Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia : Analisis DID The Impact Of The School Operational Assistance (BOS) Program On The Dropout Rate In Indonesia : A DID Analysis, 7–15.
- Oviyanti, F. (2016). Tantangan Pengembangan Pendidikan Keguruan di Era Global. *Nadwa*, 7(2), 267. <https://doi.org/10.21580/nw.2013.7.2.562>
- Rahayu, annisa. (2005). Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar (SD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Oleh : Anisa Rahayu , Endang Larasati Setianingsih Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dip.
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (n.d.). DI KOTA MALANG (Studi di Dinas Pendidikan Kota

Malang), 3(1), 61–66.

- Ruswati, L., & Munadi, S. (2013). Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis 12 Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis*, 1(1), 13–24. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/jep/article/view/46/38>
- Suryani, L. (2018). Analisis Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Masyarakat Indonesia. *Jiv*, 2(1), 42–48. <https://doi.org/10.21009/jiv.0201.6>
- Tedjawati, J. M., Kebijakan, P. P., & Kemdikbud, B. (2013). Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini: Funding for Early Childhood Education, 19(September), 346–363.
- Wahyu Nurharjadmo. (2008). Evaluasi Implementasi Pendidikan Sistem Ganda. *Spirit Publik*, 4, 215–228.
- Yuliana, R., Widayati, W., & Taufiq, A. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 261–270.